

Implementasi Kebijakan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang

[Implementation of the Integrated Community Based Child Protection Program Policy in Waringin Kurung District, Serang Regency]

Astuti^{1)*}, Winie Karina Aprilia²⁾, Nunik Hanana Awalia³⁾

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

astutime89@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan program pemerintah dalam pencegahan dan penanganan berbagai bentuk kekerasan terhadap anak melalui partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program PATBM di Kecamatan Waringin Kurung dengan menggunakan model implementasi kebijakan Cheema dan Rondinelli yang mencakup kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi, serta karakteristik dan kemampuan pelaksana. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program PATBM di Kecamatan Waringin Kurung telah berjalan dengan cukup baik. Kondisi lingkungan masyarakat mendukung pelaksanaan program melalui tingginya kepedulian terhadap isu perlindungan anak serta partisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi. Hubungan antar organisasi berlangsung secara koordinatif dengan komunikasi yang efektif antar instansi terkait. Sumber daya organisasi dinilai memadai, terutama dari segi keterlibatan kader dan dukungan kelembagaan, meskipun terdapat keterbatasan pada anggaran dan sarana pendukung. Sementara, karakteristik dan kemampuan pelaksana dinilai cukup baik, namun belum optimal karena belum adanya pelatihan khusus bagi kader PATBM. Namun, peningkatan sosialisasi, penguatan kapasitas kader, serta penambahan dukungan sumber daya masih diperlukan agar pelaksanaan Program PATBM dapat lebih optimal.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan; PATBM; Perlindungan Anak; Cheema dan Rondinelli;

ABSTRACT

The Community-Based Integrated Child Protection Program (PATBM) is a government initiative aimed at preventing and addressing various forms of violence against children through active community participation. This study aims to analyze the implementation of the PATBM Program in Waringin Kurung District using the policy implementation model developed by Cheema and Rondinelli, which includes environmental conditions, inter-organizational relationships, organizational resources, as well as the characteristics and capabilities of implementers. This research employed a qualitative method with a descriptive approach, and the data collection techniques included interviews, observations, and documentation. The findings show that the implementation of the PATBM Program in Waringin Kurung District has been carried out fairly well. Community environmental conditions support the implementation of the program through a high level of concern for child protection issues and active participation in socialization activities. Inter-organizational relationships are conducted in a coordinated manner through effective communication among related institutions. Organizational resources are considered adequate, particularly in terms of cadre involvement and institutional support, although limitations in budget allocation and supporting facilities still exist. Meanwhile, the characteristics and capabilities of implementers are considered adequate but not yet optimal due to the absence of specialized training for PATBM cadres. However, greater socialization efforts, strengthened cadre capacity, and increased resource support are still needed to optimize the implementation of the PATBM Program.

Keywords: Policy Implementation; PATBM; Child Protection; Cheema and Rondinelli;

PENDAHULUAN

Keberlanjutan suatu bangsa sangat bergantung pada perlindungan dan pemenuhan hak anak saat ini, sehingga lingkungan tumbuh kembang yang aman dan sehat hanya dapat diwujudkan melalui komitmen bersama dari negara, institusi keluarga, dan masyarakat. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan pentingnya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak sebagai upaya memberikan efek jera, sekaligus mendorong pemulihan fisik, psikis, dan sosial bagi anak korban maupun anak pelaku kejahatan agar tidak kembali terlibat dalam tindak kejahatan serupa di kemudian hari. Akan tetapi, berbagai bentuk pelanggaran hak anak, seperti eksploitasi dan kekerasan yang masih sering terjadi di Indonesia, mencerminkan lemahnya sistem perlindungan yang ada. Permasalahan seperti lemahnya pelaksanaan penegakan hukum, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak, serta keterbatasan kapasitas institusi negara dalam melaksanakan pengawasan merupakan kendala nyata dalam mewujudkan perlindungan yang efektif (Chandra Permana et al., 2025).

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA, 2024), tercatat sebanyak 74 kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Serang pada tahun 2023, hal ini menunjukkan bahwa masalah perlindungan anak masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat. Situasi di tingkat kabupaten ini sejalan dengan hasil yang ditemukan peneliti di lapangan, di mana wawancara dengan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang (DKBPPPA) mencatat adanya 4 kasus per tahun 2025 kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kecamatan Waringin Kurung. Kondisi ini menjadi peringatan bagi semua pihak untuk segera memperbaiki tantangan struktural tersebut dan membangun mekanisme perlindungan anak yang lebih adaptif serta efektif.

Salah satu upaya kebijakan perlindungan anak di Indonesia diwujudkan melalui Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), yakni suatu kerangka kerja yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pencegahan dan penanganan permasalahan anak. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan suatu inisiatif yang melibatkan partisipasi masyarakat setempat dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak di tingkat desa atau kelurahan di seluruh wilayah Republik Indonesia (Sari et al., 2025). Inti dari program tersebut terletak pada peningkatan literasi sosial mengenai hak anak serta penguatan peran lingkungan sekitar dalam mengurangi risiko kerentanan. PATBM berperan sebagai garda depan dalam mendeteksi potensi kekerasan secara dini serta mempersingkat proses birokrasi guna penanganan kasus secara efektif.

Pelaksanaan Program PATBM disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang dihadapi di masyarakat. Pada situasi yang tidak ditemukan kasus kekerasan terhadap anak, kegiatan program lebih difokuskan pada upaya pencegahan melalui sosialisasi, edukasi, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak. Sementara, ketika ditemukan kasus kekerasan terhadap anak, pelaksana program berperan dalam melakukan pelaporan, memberikan pendampingan kepada korban, serta menjalin koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memastikan proses penanganan kasus dapat berjalan secara optimal hingga tuntas. Kegiatan sosialisasi, edukasi, pelaporan, dan pendampingan korban yang menjadi bagian dari pelaksanaan Program PATBM sejalan dengan upaya perlindungan anak yang tidak hanya berfokus pada peningkatan pemahaman mengenai hak anak, tetapi juga pada pemberian dukungan kepada korban kekerasan agar memperoleh layanan yang diperlukan hingga proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Ritonga et al., 2026).

Sesuai dengan landasan teori yang dikembangkan oleh G. Shabbir cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam Permata Alifianka Prila et al., (2023) teori tersebut mengidentifikasi empat aspek utama, yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi, serta karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Dalam ranah perlindungan anak, penelitian juga menegaskan bahwa partisipasi aktif komunitas dan dukungan lingkungan sosial merupakan aspek kunci bagi keberlanjutan program perlindungan sosial di tingkat masyarakat. Selain itu, harmonisasi dan sinergi koordinasi antar lembaga menjadi fondasi penting yang menjamin kelangsungan kebijakan daerah. Oleh karena itu, optimalisasi sasaran Program Perlindungan Anak Terpadu

Berbasis Masyarakat (PATBM) sangat memerlukan kolaborasi yang kokoh dan terintegrasi antara otoritas pemerintah, elemen masyarakat, serta institusi terkait guna merealisasikan seluruh variabel keberhasilan tersebut.

Penelitian mengenai pelaksanaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program PATBM di Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang dengan menggunakan perspektif teori Cheema dan Rondinelli. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan evaluasi serta rekomendasi yang berguna bagi pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan efektivitas program perlindungan anak berbasis masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang. Pendekatan ini dianggap paling sesuai karena metode penelitian kualitatif deskriptif memungkinkan eksplorasi fenomena atau kebijakan secara bertahap dan menyeluruh. Melalui metode tersebut, peneliti berusaha menggambarkan dinamika nyata di lapangan, mencakup proses pelaksanaan program, tingkat partisipasi masyarakat, serta berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan perlindungan anak tersebut. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam dalam konteks alamiah, dengan mengutamakan pada makna, proses, dan keunikan data melalui pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis secara induktif (Sugiyono, 2023).

Subjek penelitian ini meliputi para pihak yang berperan aktif dalam pelaksanaan Program PATBM, antara lain pengurus program, aparat pemerintah setempat, serta masyarakat Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu yang dianggap relevan dengan kebutuhan data penelitian. Metode pengumpulan data dalam studi ini merupakan kombinasi dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program merupakan tahapan penting yang mengubah rencana yang telah disusun menjadi serangkaian kegiatan yang dapat dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi merupakan proses pelaksanaan suatu rencana yang telah disusun secara sistematis dan rinci sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Desni Linia Junita & Zulfiandry, 2025). Kebijakan merupakan rangkaian keputusan dan tindakan yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai dasar dalam mengarahkan pelaksanaan program atau kegiatan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan (Rawati Gulo Titi et al., 2024).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dalam menjamin bahwa suatu kebijakan mampu memberikan manfaat serta dampak yang diharapkan bagi masyarakat. Implementasi kebijakan publik adalah pelaksanaan nyata dari sebuah keputusan yang telah ditetapkan, yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada serta memberikan solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi oleh Masyarakat (Sinathria Maharaksa et al., 2025). Untuk menganalisis pelaksanaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam Kristofol Kendi, (2024). Teori tersebut menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat aspek, yaitu

A. Kondisi Lingkungan

Menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam Kristofol Kendi, (2024) kondisi lingkungan adalah keseluruhan faktor eksternal yang menentukan pelaksanaan kebijakan, yang mencakup variabel politik, sosial budaya, partisipasi kelompok sasaran, serta fasilitas fisik. Kondisi lingkungan yang kondusif akan memudahkan pelaksanaan program, sementara lingkungan yang kurang mendukung dapat menjadi penghambat dalam pencapaian tujuan kebijakan. Oleh karena itu, aspek kondisi lingkungan perlu dianalisis untuk menilai pengaruhnya terhadap implementasi Program PATBM di Kecamatan Waringin Kurung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Kecamatan Waringin, masyarakat Kecamatan Waringin Kurung menunjukkan tingkat kepedulian yang cukup tinggi terhadap isu perlindungan anak. Hal ini tercermin dari peran aktif para kader, perangkat desa, RT/RW, serta masyarakat umum dalam menjalankan kegiatan pencegahan serta pelaporan kasus kekerasan terhadap anak. Selain itu, upaya peningkatan kesadaran masyarakat terus dilakukan melalui pelaksanaan sosialisasi yang ditujukan kepada orang tua, remaja, dan anak-anak sebagai langkah strategis untuk membangun pemahaman mengenai perlindungan anak sejak usia dini.

Tabel 1. Banyaknya Kasus Kekerasan Anak di Waringin Kurung

Tahun	Banyaknya
2023	4
2024	3
2025	4

Sumber: Hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Kecamatan Waringin Kurung, data diolah oleh peneliti, (2026).

Berdasarkan informasi mengenai kejadian kekerasan terhadap anak di Kecamatan Waringin Kurung, ada 4 kasus yang tercatat pada tahun 2023, 3 kasus pada tahun 2024, dan 4 kasus pada tahun 2025. Walaupun masih ada laporan tentang kekerasan anak, semua kasus tersebut sudah ditangani dan diselesaikan oleh pihak berwenang sesuai dengan prosedur yang ada. Kondisi ini menandakan adanya perhatian dari masyarakat serta dukungan yang baik dari lingkungan dalam melaporkan dan menangani kasus, yang juga mendukung pelaksanaan Program PATBM di Kecamatan Waringin Kurung.

Meskipun tidak seluruh masyarakat memahami Program PATBM secara mendalam, mereka telah menunjukkan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan anak serta merespon dengan antusias terhadap kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan. Tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut mencerminkan dukungan nyata terhadap pelaksanaan Program PATBM di Kecamatan Waringin Kurung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mulai terlibat aktif dalam mendukung upaya perlindungan anak di wilayahnya.

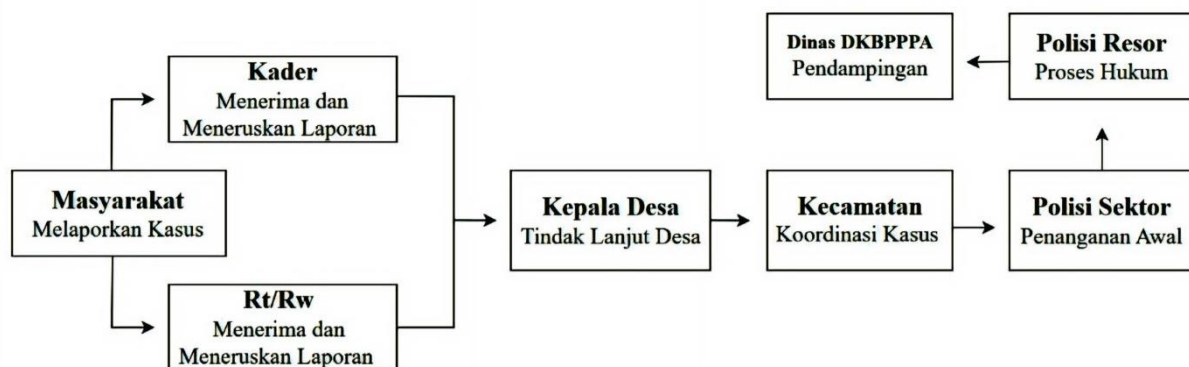
Aspek kondisi lingkungan dapat dinilai telah berjalan dengan cukup baik berdasarkan hasil penelitian. Kesadaran masyarakat akan isu perlindungan anak serta keterlibatan mereka dalam kegiatan sosialisasi menjadi aspek pendukung keberhasilan implementasi Program PATBM. Tingkat kesadaran masyarakat berperan penting dalam mendukung keberhasilan PATBM, sebab program ini berfokus pada upaya membangun pemahaman, sikap, dan perilaku yang mendukung perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan (Suastuti Sri et al., 2020). Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut guna memperluas pemahaman masyarakat mengenai Program PATBM agar tujuan program dapat disampaikan secara lebih menyeluruh.

B. Hubungan Antar Organisasi

Hubungan antar organisasi merupakan suatu bentuk kerja sama antar lembaga yang didasarkan pada kejelasan tujuan, pembagian tugas, standarisasi prosedur, komunikasi yang konsisten, serta efektivitas jejaring guna mendukung pelaksanaan program secara terkoordinasi, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi Masyarakat G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam Kristofol Kendi, (2024). Keberadaan hubungan antar organisasi yang baik memungkinkan setiap pihak yang terlibat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya secara efektif dalam mencapai tujuan program. Oleh karena itu, aspek hubungan antar organisasi perlu

dianalisis guna memahami pola koordinasi dan kerja sama yang terjalin dalam pelaksanaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kecamatan Waringin Kurung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kader Desa Cokopsulanjana dalam pelaksanaan Program PATBM di Kecamatan Waringin Kurung melibatkan berbagai pihak yang bekerja secara terkoordinasi, antara lain DKBP3A Kabupaten Serang, Kecamatan Waringin Kurung, pemerintah desa, kader PATBM, masyarakat, serta aparat keamanan seperti Polisi Sektor Kecamatan Waringin Kurung dan Polisi Resor Kabupaten Serang. Hubungan antar organisasi tersebut tercermin melalui komunikasi dan koordinasi yang berjalan secara timbal balik dalam berbagai kegiatan, mulai dari sosialisasi, upaya pencegahan, pelaporan, hingga penanganan kasus terkait perlindungan anak. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan adanya kolaborasi dan keterpaduan antar komunikasi dan koordinasi yang berjalan secara timbal balik dalam berbagai kegiatan, mulai dari sosialisasi, upaya pencegahan, pelaporan, hingga penanganan kasus terkait perlindungan anak. lembaga dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Program PATBM di Kecamatan Waringin Kurung.



Gambar 1. Alur Pelaporan Kasus dalam Program PATBM di Desa Cokopsulanjana, Kecamatan Waringin Kurung

Sumber: Hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Kecamatan Waringin Kurung, data diolah oleh Peneliti, (2026).

Berdasarkan Gambar 1 terdapat alur pelaporan dalam program PATBM di Kecamatan Waringin Kurung melibatkan pihak yang saling terhubung dalam pelaksanaan program. Hasil wawancara menunjukkan bahwa koordinasi serta komunikasi antar berbagai pihak berlangsung dengan cukup efektif dan saling memperkuat dalam pelaksanaan program perlindungan anak. Hal ini mencerminkan bahwa hubungan antar organisasi dalam pelaksanaan Program PATBM telah terbentuk melalui kerja sama dan koordinasi yang berkelanjutan, sehingga aspek hubungan antar organisasi berjalan dengan baik. Kondisi tersebut sejalan dengan konsep collaborative governance yang menekankan pentingnya kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan perlindungan anak (Sugeng Cahyono Anang et al., 2023).

C. Sumber Daya Organisasi

G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam Kristofol Kendi, (2024) berpendapat bahwa sumber daya organisasi merupakan kapasitas yang dimiliki oleh organisasi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, yang meliputi ketersediaan anggaran, dukungan kelembagaan, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta kualitas aparaturnya. Ketersediaan sumber daya yang memadai merupakan salah satu aspek krusial dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan, karena hal tersebut menentukan kemampuan organisasi dalam menjalankan program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, aspek sumber daya organisasi perlu dianalisis guna mengetahui sejauh mana ketersediaan sumber daya dapat mendukung pelaksanaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kecamatan Waringin Kurung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kader Desa Cokopsulanjana menunjukkan pelaksanaan Program PATBM belum didukung oleh kader yang secara khusus bertanggung jawab atas program

tersebut. Program tetap dapat berjalan dengan memaksimalkan peran kader Posyandu dan kader KB dalam kegiatan sosialisasi serta pelaporan kasus yang berkaitan dengan perlindungan anak. Sebagai garda terdepan dalam perlindungan anak, kader PATBM berperan dalam memantau kondisi anak di lingkungan sekitar, mengidentifikasi potensi kekerasan, melakukan pelaporan, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap anak (tangerangkota.go.id, 2024). Para kader tersebut juga telah menerima pembekalan melalui sosialisasi mengenai perlindungan anak sebagai dasar dalam melaksanakan program.

Tabel 2. Ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam Program PATBM

Nama Desa	Jumlah Posyandu	Jumlah Kader
Waringinkurung	5	15
Sambilawang	3	15
Binangun	3	15
Melati	3	15
Sasahan	5	25
Sampir	4	20
Cokopsulanjana	4	20
Telagaluhur	4	20
Kemuning	5	25
Sukabares	4	20
Sukadalem	7	35

Sumber: Hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Kecamatan Waringin Kurung, data diolah (2026)

Pada tabel 2 ketersediaan kader Posyandu dan kader KB merupakan sumber daya manusia yang menopang pelaksanaan Program PATBM di tingkat desa. Meskipun kader yang secara khusus menangani PATBM belum tersedia, keberadaan kader yang aktif di masyarakat turut mendukung terlaksananya kegiatan sosialisasi, pemantauan, dan pelaporan terkait perlindungan anak. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang ada telah dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan program.

Dari segi sarana dan prasarana, Program PATBM belum dilengkapi dengan fasilitas yang secara khusus diperuntukkan bagi pelaksanaannya. Proses pelaporan dan koordinasi masih mengandalkan perangkat pribadi milik para pelaksana program. Selain itu, narasumber mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran tetap menjadi kendala utama sehingga sejumlah kebutuhan program belum dapat terpenuhi secara optimal.

Berdasarkan temuan tersebut, aspek sumber daya organisasi dalam implementasi Program PATBM di Kecamatan Waringin Kurung dinilai belum berjalan secara optimal. Ketersediaan sumber daya manusia telah cukup menunjang kelancaran program, namun masih terdapat kekurangan pada aspek anggaran dan fasilitas pendukung. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan sumber daya organisasi sangat diperlukan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program PATBM. Manajemen peningkatan program, pelatihan, dan perkembangan tenaga kerja (SDM) merupakan unsur utama dalam mendorong efisiensi kerja di berbagai institusi (Ainiyah et al., 2025).

D. Karakteristik dan Kemampuan Pelaksana

Menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam Kristofol Kendi, (2024) karakteristik dan kemampuan pelaksana merujuk pada kapasitas yang dimiliki oleh agen pelaksana dalam menjalankan kebijakan, yang mencakup kompetensi aparatur, kemampuan administratif, kualitas komunikasi dengan masyarakat, komitmen kepemimpinan, serta kejelasan struktur birokrasi. Karakteristik dan kemampuan pelaksana menjadi aspek penting dalam implementasi kebijakan karena menentukan kemampuan pelaksana dalam menerjemahkan tujuan kebijakan ke dalam tindakan yang nyata. Berdasarkan hal tersebut, aspek karakteristik dan kemampuan pelaksana perlu dianalisis untuk mengetahui sejauh mana kapasitas pelaksana mendukung implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kecamatan Waringin Kurung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Kecamatan Waringin Kurung, para pelaksana Program PATBM telah menunjukkan pemahaman yang memadai mengenai pentingnya perlindungan anak serta peran yang harus mereka jalankan dalam program tersebut. Namun, keterbatasan pelatihan khusus yang diberikan kepada kader masih menjadi kendala dalam pengembangan kapasitas pelaksana. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan keterampilan pelaksana diperlukan agar implementasi Program PATBM dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Hasil wawancara juga mengindikasikan bahwa aspek karakteristik dan kemampuan cukup baik dalam mendukung kelangsungan Program PATBM. Hal ini terjadi karena masih kurangnya program pelatihan khusus untuk kader PATBM yang dapat meningkatkan kemampuan dan keahlian mereka dalam menjalankan program. Pelaksanaan program PATBM yang efektif memerlukan peningkatan kapasitas para pelaksana melalui kegiatan pelatihan dan edukasi secara berkelanjutan, sehingga mereka mampu menjalankan peran dan fungsi perlindungan anak dengan lebih baik (Sartika et al., 2024). Namun, para pelaksana tetap menunjukkan tanggung jawab dan respons yang positif dalam mendukung upaya perlindungan anak di masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan adanya kemampuan respons yang baik, di mana para pelaksana dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta menangani berbagai informasi dan keluhan yang berkaitan dengan perlindungan anak (Rasdiana & Ramadani Riski, 2021).

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kecamatan Waringin Kurung yang dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan Cheema dan Rondinelli, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan cukup baik meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Pada aspek kondisi lingkungan dalam implementasi program PATBM di kecamatan Waringin Kurung dapat dinilai cukup baik, masyarakat menunjukkan tingkat kepedulian yang cukup tinggi terhadap isu perlindungan anak. Hal ini terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, partisipasi kader dalam berbagai kegiatan program, serta meningkatnya kesadaran untuk melaporkan apabila terjadi kasus kekerasan terhadap anak. Namun demikian, pemahaman masyarakat mengenai Program PATBM secara menyeluruh masih belum merata. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan agar masyarakat dapat memahami tujuan, fungsi, dan manfaat program secara lebih komprehensif.

Implementasi Program PATBM dari aspek hubungan antarorganisasi didukung oleh terjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, kader PATBM, serta berbagai instansi terkait. Kejelasan mekanisme pelaporan dan respons yang cukup cepat dari pihak-pihak yang berwenang menunjukkan bahwa kolaborasi antarorganisasi telah berjalan secara efektif. Sinergi tersebut menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program sekaligus memperkuat keberlanjutannya di Kecamatan Waringin Kurung.

Pada aspek sumber daya organisasi menunjukkan bahwa keberadaan kader serta dukungan kelembagaan yang tersedia telah memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan program. Meskipun demikian, keterbatasan anggaran masih menjadi salah satu hambatan utama dalam menjalankan berbagai kegiatan perlindungan anak. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai menyebabkan beberapa kegiatan masih bergantung pada sumber daya pribadi yang dimiliki oleh para pelaksana program. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan dukungan sumber daya agar program dapat berjalan secara lebih optimal, sehingga pada aspek sumber daya organisasi dinilai cukup baik.

Aspek karakteristik dan kemampuan pelaksana dalam implementasi Program PATBM menunjukkan kondisi yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Hal ini tercermin dari adanya tanggung jawab, kepedulian, serta kemampuan pelaksana dalam merespons berbagai permasalahan perlindungan anak yang terjadi di masyarakat. Namun, belum terselenggaranya pelatihan khusus terkait Program PATBM menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kapasitas dan kompetensi pelaksana belum berkembang secara optimal.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas melalui pelatihan dan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan guna meningkatkan pengetahuan serta keterampilan pelaksana dalam menjalankan program secara efektif.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, disarankan agar pemerintah daerah dan instansi terkait terus memperkuat upaya sosialisasi Program PATBM kepada masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, koordinasi antarorganisasi perlu terus ditingkatkan, disertai dengan penambahan dukungan anggaran, fasilitas, dan sarana pendukung lainnya. Pengembangan kapasitas kader melalui pelatihan yang rutin dan berkesinambungan juga perlu menjadi perhatian utama. Dengan adanya perbaikan pada berbagai aspek tersebut, implementasi Program PATBM di Kecamatan Waringin Kurung diharapkan dapat berjalan lebih efektif, optimal, dan berkelanjutan dalam mewujudkan perlindungan anak yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, N., Kurniawan Rifky, Setia Irfandi Agus, Trihantoyo Syunu, & Sholeh Muhamad. (2025). Peran Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Produktivitas Organisasi. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 5(3), 1296–1310. <https://doi.org/10.60036/jbm.619>
- Chandra Permana, A., Ul Hosnah, A., & Ilmu Sosial, J. (2025). Law No. 39 of 1999 on Human Rights, and Law No. 35 of 2014 on Child Protection. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6). <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2716>
- Desni Linia Junita, E., & Zulfandry, R. (2025). Implementasi Sistem Informasi Data Alumni Berbasis. *Jurnal Media Infotama*, 21(2), 341139. <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/jmi.v21i2.9284>
- KEMENPPPA. (2024). ANAK (BANTEN, 2023) Jumlah Kekerasan Terhadap Anak menurut Jenis Kekerasan yang Dialami. https://siga.kemenpppa.go.id/pencarian/detail?element_id=2b4a37597575685a58496649694f67384755542f73673d3d&entry_id=70724d49587162724c3649624c4545324c62396745513d3d&tahun=2023&prov=regency&kab=36&kec=0&typee=0&month=0
- Kristofol Kendi, I. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK Aktor, Perangkat, Manajemen, dan Isu-Isu Otonomi Khusus Papua. MANGGU MAKMUR TANJUNG LESTARI. www.penerbitmanggu.co.id
- Permata Alifianka Prila, & Tukiman. (2023). Implementasi Kebijakan Suroboyo Bus Sebagai Transportasi Publik. *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.51135/PublicPolicy.v4.i2.p424-442>
- Rasdiana, & Ramadani Riski. (2021). Responsivitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 249–265. <https://doi.org/10.52316/jap.v17i2.76>
- Rawati Gulo Titi, Mendrofa Rosalia, & Elazhari. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK SERTA TERHADAP KEPENTINGAN PUBLIK BERDASARKAN TEORI ADMINISTRASI NEGARA SAAT INI. *Journal Genta Mulia*, 15(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.61290/gm.v15i1>
- Ritonga, D., & Chairina, N. (2026). PERAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) DALAM UPAYA MENCEGAH KEKERASAN TERHADAP ANAK DI PROVINSI BANTEN. *Datuk Sulaiman Law Review DalRev*, 7(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24256/dalrev.v7i1.10204>
- Sari, N. K. D. P., Wirantari, I. D. A. P., & Lukman, J. P. (2025). Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam Menangani Tindakan Kekerasan Terhadap Anak di Desa Tegal Kertha Kota Denpasar. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 2(2). <https://doi.org/10.61292/shkr.214>
- Sartika, D. D., Hikmah Purnama, D., Effendi, S., & Wulindari, A. (2024). Pencegahan Tindak Kekerasan Pada Anak Melalui Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

- (PATBM) di Desa Tanjung Dayang Selatan Kabupaten Ogan Ilir. *BANTENESE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 6(1), 55–64. <https://doi.org/10.30656/ps2pm.v6i1.7894>
- Sinathria Maharaksa, M., Dermawan Triharjono, H., Fadilah, F. N., Zahra, S. A., Solihat, K., Firda, S. M., & Hidayat, Z. A. (2025). Implementasi Kebijakan Publik: Pengertian, Model-model dan Penerapannya Dalam Contoh studi kasus. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), 69–73. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i6.320>
- Suastuti Sri, Eddy Patra Elman, & Artiasha Kisti. (2020). Peningkatan Kapasitas Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Sumbangsih*, 1(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.23960/jsh.v1i1.4>
- Sugeng Cahyono Anang, Sari Dewi Retno, Zauhar Soesilo, Domai Tjahjanulin, & Siswidiyanto. (2023). Collaborative Governance Dalam Pelayanan Perlindungan Anak Di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, (3). <https://doi.org/https://doi.org/10.59141/jist.v4i3.601>
- Sugiyono. (2023). *METODE PENELITIAN KUALITATIF* (3rd ed.). CV Alfabeta.
- tangerangkota.go.id. (2024, April 23). *Dr. Nurdin Apresiasi Peran Penting Kader dan Aktivis Perlindungan Perempuan dan Anak*. <https://tangerangkota.go.id/berita/detail/42283/dr-nurdin-apresiasi-peran-penting-kader-dan-aktivis-perlindungan-perempuan-dan-anak>